

FULL-FLEDGED INFLATION TARGETING FRAMEWORK DAN PERSISTENSI INFLASI

Oleh :

Rachman Hakim

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Madura

ABSTRACT

Setting the inflation rate may look simple but certainly not easy. This can be evidenced by frequent melencengnya inflation target has been set by Bank Indonesia. To overcome this, the 2004 Law No. 3 Article 7 were excluded, thus changing the policy framework of inflation targeting lite be a full-fledged inflation targeting. This means that Bank Indonesia will focus on regulating the rate of inflation only. The purpose of this study to determine whether the rate of inflation to be more easily controlled in the period of full-fledged inflation targeting. The method used is the autoregressive model estimation. The results showed that the application of full-fledged inflation targeting has not had a positive impact in regulating the rate of inflation. In the period 2005-2015, was inflation is still very difficult to control or tend to be persistent. Interestingly, this was due to the strong influence of the global economy on the Indonesian economy.

Keywords: *full-fledged inflation targeting, inflation persistence*

ABSTRAK

Mengatur laju inflasi mungkin terlihat sederhana tapi jelas tidak mudah. Ini bisa dibuktikan dengan sering melencengnya target inflasi yang telah ditetapkan Bank Indonesia. Untuk mengatasi hal tersebut, tahun 2004 Undang-Undang No. 3 Pasal 7 dikeluarkan, sehingga kerangka kebijakan berubah dari inflation targeting lite menjadi full-fledged inflation targeting. Artinya Bank Indonesia akan lebih fokus untuk mengatur laju inflasi saja. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah laju inflasi menjadi lebih mudah dikendalikan pada periode full-fledged inflation targeting. Metode yang digunakan adalah estimasi model autoregressive. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan full-fledged inflation targeting belum memberikan dampak yang positif dalam mengatur laju inflasi. Dalam periode 2005-2015, ternyata inflasi masih sangat sulit untuk dikendalikan atau cenderung persisten. Menariknya, hal ini ternyata disebabkan kuatnya pengaruh perekonomian global terhadap perekonomian Indonesia.

Kata kunci: *full-fledged inflation targeting, persistensi inflasi*

PENDAHULUAN

Krisis tahun 1998 seperti membuka mata Bank Indonesia tentang pentingnya mengendalikan laju inflasi. Faktanya ternyata inflasi bisa memiliki dampak yang multidimensional. Hal ini menuntut

Bank Indonesia untuk mengubah tatanan kelembagaan menjadi Bank Indonesia yang bertugas untuk mengontrol laju inflasi. Perubahan tatanan ini diwujudkan dengan mengganti Undang-Undang No. 13 Tahun 1968 dengan Undang-Undang

No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Pohan, 2008).

Disahkannya penerapan Undang-Undang No. 23 Tahun 1999, membuat Bank Indonesia menjadi lembaga yang independen, Bank Indonesia juga mempunyai tujuan yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Hal ini menunjukkan secara implisit bahwa tujuan kebijakan moneter di Indonesia adalah menjaga kestabilan harga (inflasi).

UU No. 23 Tahun 1999 mulai diterapkan pada awal tahun 2000. Bank Indonesia mengumumkan target inflasi yang ingin dicapai setiap tahunnya. Sejak saat itu, target inflasi menjadi elemen penting dalam kebijakan moneter, utamanya karena target tersebut diumumkan secara eksplisit kepada publik. Dengan demikian, penetapan sasaran inflasi menjadi sesuatu yang mengikat dalam setiap perumusan kebijakan moneter Bank Indonesia.

Penetapan inflasi sebagai satu-satunya sasaran akhir dalam sebuah kebijakan moneter seringkali disebut dengan *Inflation Targeting Framework (ITF)*. Akan tetapi, kerangka kebijakan moneter yang

dipraktekkan Bank Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 masih dikategorikan sebagai *Inflation Targeting Lite*, yaitu penerapan ITF secara parsial atau dikatakan ringan. Kerangka kebijakan ini masih tercampur dengan komitmen untuk mencapai tujuan kebijakan yang lain. Artinya stabilitas inflasi bukanlah satu-satunya tujuan Bank Indonesia.

Hal tersebut kemudian berubah ketika Bank Indonesia menjadikan Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 Pasal 7 sebagai sebuah landasan baru dalam membuat kebijakan moneter. Hal ini bisa dikatakan sebagai batu loncatan bagi Bank Indonesia dari menerapkan *inflation targeting lite* menuju *full-fledged inflation targeting*. Artinya, dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 Pasal 7 maka Bank Indonesia bisa dibilang menganut *Inflation Targeting Framework* secara penuh. Itu menandakan tujuan akhir kebijakan moneter difokuskan untuk menjaga stabilitas inflasi saja.

Dalam penerapan *full-fledged inflation targeting*, sebenarnya desain kerangka kebijakan moneter

masih sangat memungkinkan untuk dibuat fleksibel khususnya pada masa-masa awal penerapannya. Jenis, kisaran (*range*), level, dan periode pencapaian target inflasi, serta juga prosesnya dapat disesuaikan dengan karakteristik perekonomian negara berkembang yang pada umumnya memiliki variabilitas inflasi yang tinggi. Di level operasional, target operasional (baik suku bunga maupun agregat moneter) juga dapat digunakan secara bersama-sama untuk secara gradual diarahkan menjadi satu target operasional saja yang akan mewakili *stance* kebijakan moneter.

Demikian pula halnya dengan tingkat transparansi dan akuntabilitas yang dapat diupayakan secara bertahap. Namun, yang harus selalu diingat disini adalah bahwa fleksibilitas tersebut mempunyai *trade-off* dengan kredibilitas sehingga desain ITF yang fleksibel tersebut memang dimaksudkan untuk digunakan selama masa transisi. Selain itu, fleksibilitas juga harus dibatasi sepanjang tidak mengaburkan kerangka kebijakan ITF.

Dalam kerangka ITF, Bank Indonesia akan mengumumkan sasaran inflasi untuk setiap tahunnya. Setiap periode Bank Indonesia mengevaluasi apakah proyeksi inflasi ke depan masih sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Proyeksi ini dilakukan dengan sejumlah model dan sejumlah informasi yang dapat menggambarkan kondisi inflasi ke depan berdasarkan fakta yang ada di lapangan pada saat itu. Jika proyeksi inflasi sudah tidak kompatibel dengan sasaran, Bank Indonesia melakukan respon dengan menggunakan instrumen yang dimiliki. Misalnya jika proyeksi inflasi telah melampaui sasaran, maka Bank Indonesia akan cenderung melakukan pengetatan moneter. Tujuannya tentu agar inflasi aktual kembali mendekati target inflasi.

Penerapan ITF di berbagai negara, khususnya negara berkembang seperti Indonesia, seringkali menimbulkan pro dan kontra. Pihak yang pro mengatakan bahwa penerapan ITF menuntut komitmen yang tinggi dari otoritas moneter untuk mencapai target

inflasi yang telah ditetapkan. Tugas otoritas moneter menjadi terfokus. Sementara itu, pihak yang kontra mengatakan bahwa penerapan ITF di Indonesia belum waktunya mengingat belum terpenuhinya beberapa prakondisi yang diperlukan, yaitu posisi fiskal yang kuat, kestabilan makroekonomi, dan pasar keuangan yang mapan.

Pihak yang pro berpendapat bahwa pada hakikatnya prakondisi untuk ITF juga berlaku bagi hampir semua kerangka kerja kebijakan moneter. Selain itu, pengalaman di beberapa negara menunjukkan bahwa keberadaan prakondisi tersebut tidak bersifat mutlak ketika ingin menerapkan kerangka ITF, dan penerapan ITF dapat dilakukan secara bertahap dari yang *lite* sampai menjadi *full-fledged*. Belum terpenuhinya beberapa prakondisi ITF dapat disikapi dengan penerapan ITF yang sifatnya fleksibel, namun tetap dengan mengedepankan kejelasan baik dalam hal inflasi sebagai sasaran tunggal kebijakan moneter maupun dalam hal komitmen bank otoritas moneter dalam merumuskan respon kebijakan yang diarahkan untuk mencapai

target inflasi yang ditetapkan. Pilihan ITF yang fleksibel akan lebih optimal daripada melaksanakan kebijakan moneter tanpa kejelasan kerangka kerja.

Dengan penekanan pada tujuan kestabilan harga, pertanyaan penting yang kemudian muncul adalah kerangka kerja kebijakan moneter seperti apa yang paling sesuai dengan UU No. 23 Tahun 1999. Keberadaan target inflasi yang diumumkan kepada publik dan penetapan sasaran moneter yang diarahkan kepada pencapaian target inflasi tersebut sangat sesuai dengan kerangka ITF. Dalam terminologi kebijakan moneter, sasaran inflasi dapat dianggap sebagai *overriding objective* atau juga sebagai sasaran antara, sedangkan besaran moneter (agregat moneter atau suku bunga) sebagai *operating target*.

Fitur lain yang sangat penting dalam kerangka ITF seperti independensi, transparansi, dan akuntabilitas juga mendapat porsi penting dalam UU No. 23 Tahun 1999. Berbeda dengan UU No. 13 Tahun 1968 yang menempatkan Bank Indonesia sebagai pembantu pemerintah dalam melaksanakan

keputusan-keputusan yang ditetapkan Dewan Moneter, dalam UU No. 23 Tahun 1999 ini Bank Indonesia ditetapkan sebagai lembaga negara yang independen yang bebas dari campur tangan pemerintah (Pasal 4). Independensi ini ditegaskan pula dengan ketentuan bahwa pemerintah dan pihak lain diluar Bank Indonesia dilarang melakukan segala bentuk campur tangan terhadap pelaksanaan tugas Bank Indonesia.

Dalam perjalannya ITF tidaklah menuai hasil seperti yang

diharapkan. Target inflasi yang sudah ditetapkan seringkali tidak sesuai dengan inflasi aktual. Bank Indonesia terlihat masih menemui banyak kendala untuk mengontrol laju inflasi. Hal ini tentu harus diperbaiki oleh Bank Indonesia untuk memperbaiki kredibilitas mereka di mata masyarakat Indonesia. Bank Indonesia harus bisa menentukan instrumen kebijakan yang tepat agar inflasi aktual berada pada kisaran yang diharapkan atau sesuai dengan target inflasi.

Tabel 1. Target Inflasi dan Inflasi Aktual di Indonesia, 2001-2014

Tahun	Target Inflasi	Inflasi Aktual (%_{yoy})
2001	4%-6%	12,55
2002	9%-10%	10,03
2003	9±1%	5,06
2004	5,5±1%	6,40
2005	6±1%	17,11
2006	8±1%	6,60
2007	6±1%	6,59
2008	5±1%	11,06
2009	4,5±1%	2,78
2010	5±1%	6,96
2011	5±1%	3,79
2012	4,5±1%	4,30
2013	4,5±1%	8,38
2014	4,5±1%	8,36

Sumber: Bank Indonesia

Penelitian mengenai persistensi inflasi pernah beberapa kali dilakukan di Indonesia. Alamsyah (2008) mengemukakan mengenai adanya persistensi inflasi yang tinggi di Indonesia, dimana persistensi

inflasi disagregat untuk kategori makanan dan jasa masing-masing 0.8 dan 0.9. Akan tetapi, terdapat kecenderungan bahwa ada kecenderungan derajat persistensi inflasi mulai menurun dalam periode

pasca krisis. Penelitian Harmanta, Bathaluddin dan Waluyo (2011) menunjukkan bahwa persistensi inflasi di Indonesia cenderung mengalami penurunan pada *full-fledged inflation targeting*. Artinya ada perbedaan pendapat antara dua penelitian tersebut. Itulah menariknya sehingga penelitian terkait persistensi inflasi masih layak untuk dilakukan.

Penelitian ini ingin mengukur seberapa besar tingkat persistensi inflasi di Indonesia. Sekaligus membuktikan apakah keputusan bank Indonesia untuk mengubah kerangka kebijakannya *full-fledged inflation targeting* berdampak positif terhadap tingkat persistensi inflasi.

Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat besarnya tingkat atau derajat persistensi inflasi di Indonesia, terutama pada periode *full-fledged inflation targeting*. Artinya akan diukur berapa lama kecepatan yang diperlukan oleh inflasi untuk kembali ke kondisi semula setelah terjadinya kejutan atau *shock*. Jika kecepatannya rendah bisa dikatakan bahwa inflasinya sangat persisten. Akan tetapi jika kecepatannya tinggi, kita bisa

mengatakan bahwa inflasinya tidak persisten.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini disusun dengan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan berupa data sekunder yang berasal dari Bank Indonesia. Data tersebut nantinya akan diolah supaya nantinya bisa memberikan jawaban terhadap rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

Jenis dan Sumber Data

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yaitu, data inflasi bulanan (*year-on-year*) dari bulan januari 2005 sampai Mei 2015. Penggunaan data dari tahun 2005 dikarenakan periode *full-fledged inflation targeting* bisa dibilang mulai diterapkan pada tahun tersebut. Sumber data berasal dari Bank Indonesia. Latar belakang penggunaan data inflasi *year-on-year* berdasarkan beberapa alasan. Penggunaan data inflasi *month-on-month* ataupun *quarter-to-quarter* sangat terkait dengan faktor seasonal sehingga dikhawatirkan kurang dapat menggambarkan tingkat persistensi

inflasi yang sebenarnya (Arimurti, 2011).

Teknik Analisis Data

- *Autoregressive* (AR)

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengukur derajat persistensi inflasi pada pendekatan univariat. Dengan melihat kelebihan dan kekurangan masing-masing, penelitian ini akan menggunakan metode *autoregressive* (AR).

$$\pi_t = \mu + \sum_{j=1}^K \alpha_j \pi_{t-j} + \varepsilon_t$$

Dimana: π_t = tingkat inflasi pada waktu t

μ = konstanta dari hasil proses estimasi, sebagai kontrol terhadap rata-rata inflasi

$\sum_{j=1}^K \alpha_j$ = jumlah koefisien AR

ε_t = *random error term* atau residual dari regresi persamaan di atas

Dari hasil estimasi persamaan tersebut, tingkat persistensi inflasi dihitung dengan melihat jumlah koefisien AR. Cara penjumlahan koefisien tersebut merupakan cara pengukuran skalar persistensi terbaik menurut Andrews dan Chen (1994).

PEMBAHASAN

Hasil estimasi model *autoregressive* dengan menggunakan data inflasi selama periode *full-fledged inflation targeting* menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Estimasi Model *Autoregressive*

Source	SS	df	MS			
Model	1407.94308	1	1407.94308	Number of obs =	125	
Residual	206.504789	123	1.67890072	F(1, 123) =	838.61	
Total	1614.44787	124	13.0197409	Prob > F =	0.0000	
				R-squared =	0.8721	
				Adj R-squared =	0.8710	
				Root MSE =	1.2957	

var1	Coef.	Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]	
var2	.9336199	.0322396	28.96	0.000	.8698035	.9974363
_cons	.4918705	.2629013	1.87	0.064	-.0285266	1.012268

Sumber: data diolah

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa ternyata persistensi inflasi di Indonesia sangat tinggi selama periode *full-fledged inflation targeting*. Angkanya mencapai 0,9336199 atau hampir menyentuh angka satu. Hal ini menandakan kalau inflasi di Indonesia sangat persisten, artinya kecepatan turunnya laju inflasi sangatlah lambat. Hal ini tentu bukan pertanda yang baik. Penelitian Alamsyah (2008) menunjukkan hasil yang tidak jauh berbeda dimana persistensi inflasi

berada di kisaran 0,9. Sementara itu, jika dibandingkan dengan penelitian Harmanta, Bathaluddin dan Waluyo (2011), penelitian ini memberikan hasil yang cukup berbeda. Persistensi inflasi tidak bisa dibilang lebih baik dibandingkan periode sebelumnya mengingat betapa persistennya inflasi selama periode *full-fledged inflation targeting*.

Sangat persistennya tingkat inflasi selama periode *full-fledged inflation targeting* bisa dibuktikan dengan melihat tabel di bawah ini.

Tabel 3. Data Inflasi Tahun 2005-2015

Bln	Tahun										
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Jan	7.32	17.03	6.26	7.36	9.17	3.72	7.02	3.65	4.57	8.22	6.96
Feb	7.15	17.92	6.30	7.40	8.60	3.81	6.84	3.56	5.31	7.75	6.29
Mar	8.81	15.74	6.52	8.17	7.92	3.43	6.65	3.97	5.90	7.32	6.38
Apr	8.12	15.40	6.29	8.96	7.31	3.91	6.16	4.50	5.57	7.25	6.79
Mei	7.40	15.60	6.01	10.38	6.04	4.16	5.98	4.45	5.47	7.32	7.15
Juni	7.42	15.53	5.77	11.03	3.65	5.05	5.54	4.53	5.90	6.70	-
Juli	7.84	15.15	6.06	11.90	2.71	6.22	4.61	4.56	8.61	4.53	-
Agus	8.33	14.90	6.51	11.85	2.75	6.44	4.79	4.58	8.79	3.99	-
Sep	9.06	14.55	6.95	12.14	2.83	5.80	4.61	4.31	8.40	4.53	-
Okt	17.89	6.29	6.88	11.77	2.57	5.67	4.42	4.61	8.32	4.83	-
Nov	18.38	5.27	6.71	11.68	2.41	6.33	4.15	4.32	8.37	6.23	-
Des	17.11	6.60	6.59	11.06	2.78	6.96	3.79	4.30	8.38	8.36	-

Sumber: Bank Indonesia

Data di atas menunjukkan ketika inflasi cukup tinggi maka akan dibutuhkan waktu yang cukup lama hingga laju inflasi menjadi normal kembali. Perhatikan data bulan Oktober 2005 sampai bulan September 2006. Ada rentang sekitar

12 bulan dimana inflasi berada di level yang cukup tinggi. Fakta seperti ini menandakan betapa persistennya laju inflasi. Artinya inflasi tidak segera kembali ke level normalnya. Hal yang sama juga terjadi selama bulan Mei 2008 sampai bulan

Desember 2008. Rentang waktu delapan bulan jelas bukan waktu yang bisa dibilang singkat untuk membiarkan laju inflasi berada pada level yang cukup tinggi.

Ada alasan yang cukup masuk akal kenapa pada tahun 2005 dan 2008 inflasi yang tinggi menjadi berlarut-larut. Ternyata alasannya pun bisa dibilang hampir sama. Pada periode tersebut perekonomian Indonesia sangat dipengaruhi oleh kondisi keuangan global. Tahun 2005 ketidakseimbangan keuangan global dan tingginya harga minyak dunia memicu ketidakstabilan perekonomian Indonesia. Nilai tukar sangat fluktuatif dan inflasi pun mulai terpengaruhi. Tahun 2008 gejolak di pasar keuangan Amerika Serikat yang berawal dari krisis perumahan mulai menyebar dan mengakibatkan krisis global. Pada akhirnya, kondisi perekonomian di Indonesia juga terpengaruh sehingga laju inflasi tidak terkontrol.

Sebenarnya, cukup mudah untuk menjelaskan kenapa kita sangat mudah dipengaruhi kondisi perekonomian secara global. Hal ini dikarenakan Indonesia cukup tergantung dengan produk luar

negeri, yang bisa ditunjukkan dengan tingginya jumlah impor kita. Bahkan jumlahnya terus naik dari tahun ke tahun. Jika hal ini terus berlanjut, sulit bagi kita untuk lepas dari pengaruh global.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, bisa ditarik kesimpulan bahwa penggunaan *full-fledged inflation targeting* bisa dikatakan belum memberikan hasil yang memuaskan. Hal ini bisa ditunjukkan dengan sulitnya mengontrol laju inflasi pada periode tersebut. Dengan kata lain, inflasi masih tergolong sangat persisten. Menariknya, selama ini inflasi yang sangat persisten ternyata dipengaruhi oleh kondisi perekonomian global. Artinya laju inflasi di Indonesia lebih dipengaruhi faktor eksternal dibandingkan internal sendiri. Tentu ini menjadi tantangan sendiri bagi Indonesia untuk lepas dari pengaruh luar. Salah satu caranya bisa dengan mengurangi ketergantungan terhadap produk dari luar negeri.

DAFTAR PUSTAKA

Alamsyah, Halim. 2008. *Persistensi Inflasi dan Dampaknya Terhadap Pilihan dan Respon*

- Kebijakan Moneter di Indonesia. *Disertasi*. Program Pascasarjana Universitas Indonesia. Depok.
- Andrews, D.W.K, dan H.Y. Chen. 1994. Approximately Median-Unbiased Estimation of Autoregressive Models. *Journal of Business & Economic Statistics* 12(2).
- Arimurti, T. dan B. Trisnanto. 2011. Persistensi Inflasi di Jakarta dan Implikasinya Terhadap Kebijakan Pengendalian Inflasi Daerah. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan* 14(1): 5-29.
- Bank Indonesia. 2015. *Pengenalan Inflasi*. www.bi.go.id
- Batini, Nicoletta. 2002. Euro Area Inflation Persisten. *European Central Bank Working Paper* 201: 1-59.
- Harmanta, M. B. Bathaludin, dan J. Waluyo. 2011. Inflation Targeting Under Imperfect Credibility: Lessons from Indonesian Experience. *Bulletin of Monetary, Economics and Banking* 2011: 271-306.
- Marques, C. R. 2004. Inflation Persistence, Facts or Artefacts?. *European Central Bank, Working Paper Series* 371: 1-50.
- Pohan, A. 2008. *Kerangka Kebijakan Moneter & Implementasinya di Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.